



# Penyusunan LKPD yang Berkualitas untuk Mempertahankan WTP Serta Menjaga Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

# Manajemen Pengelolaan Pemda

Permendagri No. 70  
Tahun 2019

Sistem Informasi  
Pemerintahan Daerah

Permendagri No. 77  
Tahun 2020

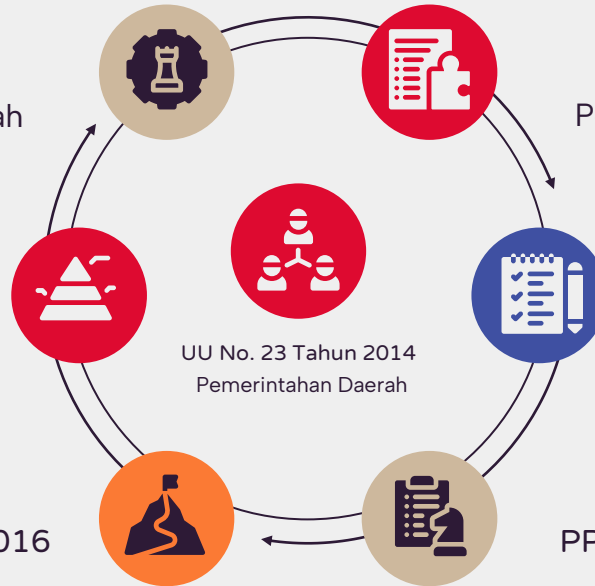
Pedoman Teknis  
Pengelolaan Keuangan  
Daerah

PP No. 12 Tahun 2019  
Pengelolaan Keuangan  
Daerah

PP No. 12 Tahun 2017  
Pembinaan dan  
Pengawasan  
Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah

PP No. 18 Tahun 2016  
Perangkat Daerah

PP No. 13 Tahun 2019  
Laporan dan Evaluasi  
Penyelenggaraan  
Pemerintah Daerah



# Siklus Anggaran Tahunan

01

## Penetapan kebijakan

Penentuan prioritas program dan kegiatan pelayanan publik

02

## Formulasi Anggaran

Alokasi sumber daya keuangan publik ke dalam program dan kegiatan yang menjadi prioritas

03

## Penetapan Anggaran

Legislatif memberikan mandat ke eksekutif untuk melakukan penarikan uang dan membelanjakannya

04

## Implementasi Anggaran

Pengeluaran uang sesuai alokasi program dan kegiatan

05

## Akuntansi dan Pelaporan

Pencatatan transaksi keuangan dan publikasi laporan keuangan




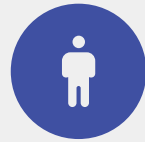



06

## Audit Eksternal

Pemeriksaan oleh BPK untuk memastikan kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

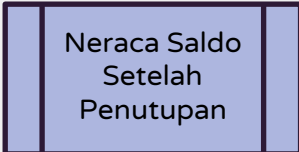
# Sembilan Prinsip Good Governance



- |                     |                                                                                   |                       |                                                                                    |                  |                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Transparansi        |  | Rule of Law           |  | Strategic Vision |  |
| Efisien dan Efektif |  | Partisipasi           |  | Akuntabilitas    |  |
| Responsive          |  | Consensus Orientation |  | Equity           |  |



# Siklus Akuntansi SAPD



Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penutupan



8

Valid (v)  
Sah (v)  
Lengkap (v)

## SIKLUS AKUNTANSI PEMDA



7

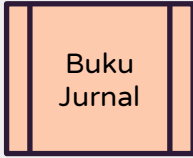
Jurnal Penutup

6

Penyusunan Laporan Keuangan

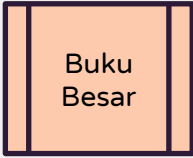
1

Penjurnalan Anggaran  
Analisis dan Penjurnalan Transaksi



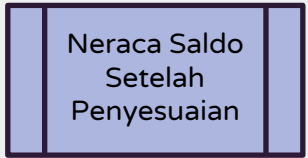
4

Posting



5

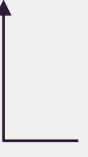
Peringkasan



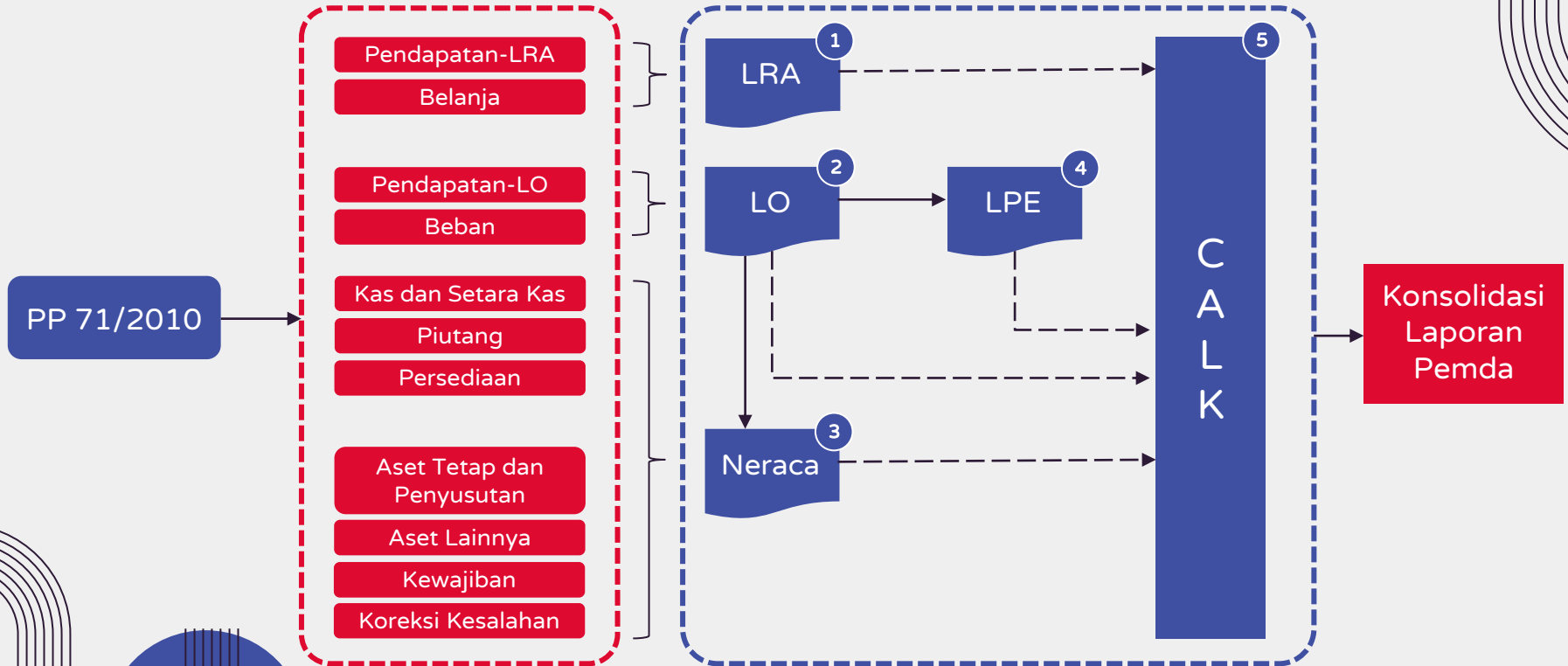
2

Penyesuaian Akhir Tahun

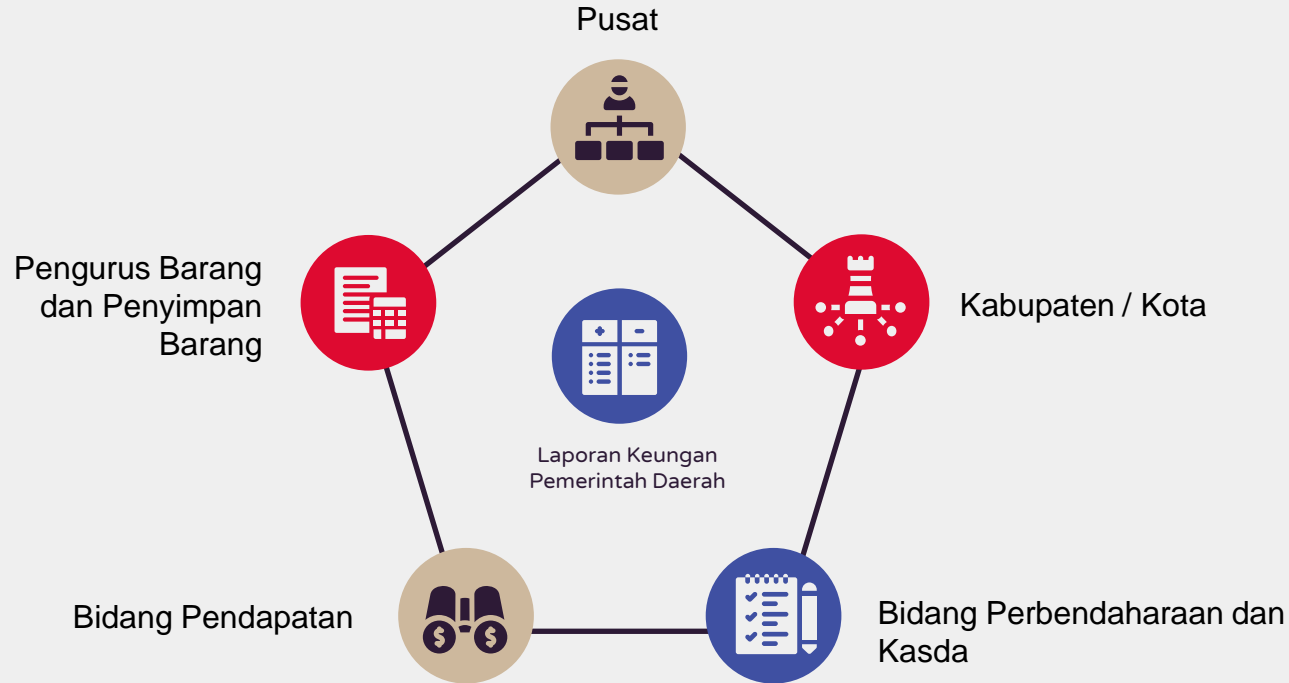
3



# Alur Penyusunan LK SKPD



# Sumber Data Penyusunan LKPD

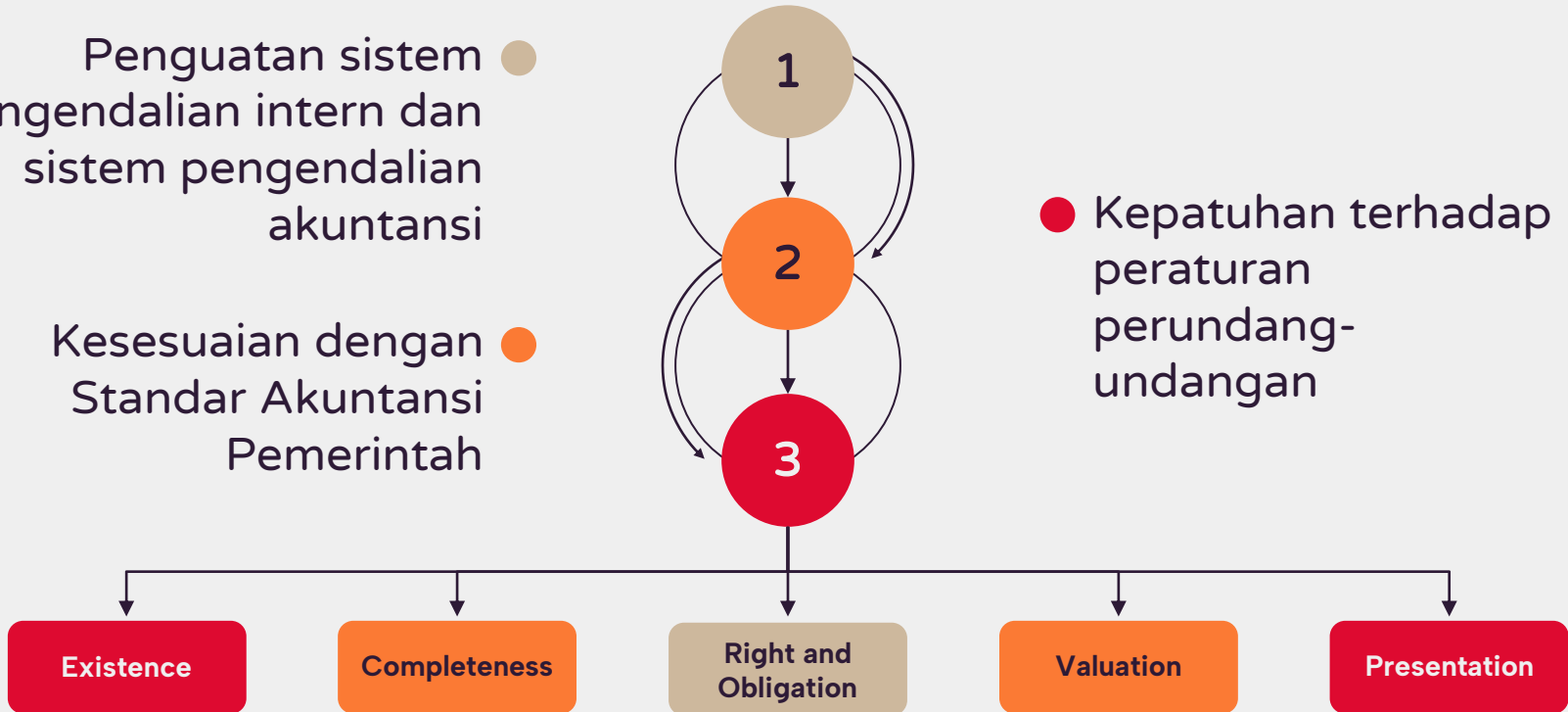


# Strategi Penyusunan Laporan Keuangan

Penguatan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian akuntansi ●

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah ●

● Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan



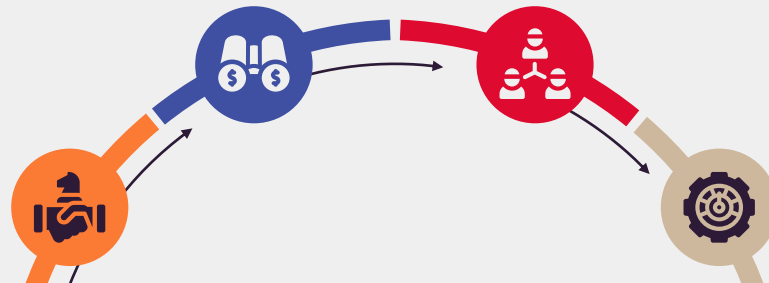


# Strategi Tambahan untuk Penyusunan Laporan Keuangan

Strategi tambahan untuk penyusunan laporan keuangan adalah **AUDITABLE**

## **AUDITABLE (Dapat diaudit) :**

Memastikan seluruh catatan baik dalam laporan keuangan pokok, sistem pencatatan, buku-buku tambahan, dan bukti-bukti pendukung dapat dijejaki/ditelusur (*tracing*) secara memadai sehingga memungkinkan pemeriksa untuk dapat menempuh prosedur audit sesuai Standar Profesional Audit dan dapat memperoleh keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) atas setiap akun yang disajikan dalam laporan keuangan pokok





# Inovasi Kebijakan Dalam Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## Permasalahan

Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa “Pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang Lengkap dan Sah”. Namun demikian tidak ada definisi teknis atas “Lengkap dan Sah” tersebut

Sekolah negeri milik Pemerintah Provinsi (SMA/SMK/SLB) secara struktur instansi berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Namun pengelolaannya masih menganut asas Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sesuai UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

## Inovasi

Ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelengkapan Dan Verifikasi Dokumen, Pertanggungjawaban Bendahara Anggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Sekolah Provinsi Jawa Tengah





# Inovasi Kebijakan Dalam Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## Permasalahan


Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditetapkan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), akan tetapi peraturan lebih lanjutnya belum ada. Terutama hubungan keuangan antara Pengguna Anggaran (PA) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BLUD

Dalam saldo piutang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih terdapat piutang-piutang yang berumur lama dan sulit ditagih. Beberapa piutang tersebut juga tidak bisa dialihkan penagihannya kepada PUPN/KPLN, sehingga proses penghapusan pun tidak bisa dilakukan

## Inovasi

Ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Disusunnya draf Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengelolaan Piutang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sedang dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah





# Inovasi Kebijakan Dalam Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## Permasalahan

Swakelola adalah mekanisme pengadaan yang sah menurut ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam skema Swakelola, SKPD dapat bertindak:

- 1) Selaku Penanggung Jawab Anggaran, atau
- 2) Sebagai Pelaksana Swakelola dari dana Instansi Pemerintah lain, SKPD lain, BLU/BLUD/BUMN/BUMD/BUMS

Namun terkait swakelola ini, belum ada peraturan lebih lanjutnya

## Inovasi

Ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kegiatan Secara Swakelola Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah





# Tantangan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang belum sepenuhnya terintegrasi
- SDM pada tingkat OPD yang belum memahami akan pentingnya akuntansi dan satuan pengawas intern
- Kurangnya koordinasi antara bidang yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan aset
- Peraturan tentang pengelolaan daerah yang belum dipahami secara menyeluruh sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda
- Belum adanya petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat terkait pengelolaan keuangan satuan pendidikan





# Upaya Mengatasi Tantangan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

- Melakukan integrasi antar aplikasi yang ada dengan disertai penyusunan kebijakan yang relevan untuk memudahkan proses penyusunan LKPD
- Mengembangkan sistem yang menunjang penyusunan LKPD yang mudah dipahami oleh SDM tanpa latar belakang pendidikan akuntansi
- Melakukan evaluasi terhadap peraturan-peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah agar tercipta sinkronisasi dan komunikasi yang baik mulai dari unsur perencanaan sampai pertanggungjawaban
- Menyusun kebijakan dengan mempertimbangkan aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan yang ada di tingkat pusat maupun daerah
- Mengembangkan aplikasi khusus satuan pendidikan yang mudah dipahami oleh pelaksana keuangan di satuan pendidikan



# Strategi Meningkatkan Kualitas LKPD untuk Mempertahankan opini WTP

Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Memperkuat SPI dalam rangka mencegah, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan serta menindak fraud

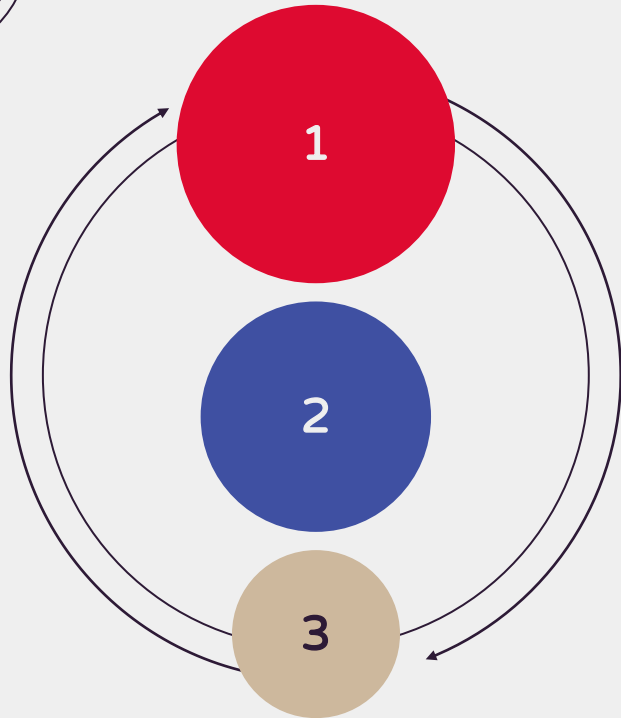
Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan dan teknologi informasi

Proaktif mengkonsultasikan permasalahan melalui APIP (Inspektorat dan BPKP)

Menyusun kebijakan pengelolaan keuangan dan pengintegrasian sistem aplikasi

Menyiapkan data pendukung untuk menjelaskan permasalahan sedini mungkin

# Harapan atas Pemeriksaan BPK Dalam Menunjang Tugas Entitas



- BPK berperan dalam audit atas program-program yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan Jawa Tengah seperti kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Sehingga harapannya, hambatan kelancaran pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi yang secara lintas sektoral berhubungan dengan Pemerintah Pusat sekiranya dapat menjadi perhatian juga oleh BPK
- Menegakkan independensi, integritas, profesionalisme
- Tetap menjaga kualitas pemeriksaan melalui :
  - 1) Penyampaian data dan informasi secara tepat waktu
  - 2) Dukungan dan kerjasama yang baik dari entitas
  - 3) Komunikasi auditor dan auditee secara baik



# Sinergi dan Kolaborasi Antara Auditee, APIP, dan Auditor

